

**THE ROLE OF ACCOUNTING INFORMATION IN TAKING THE FINANCIAL
POLICY OF THE KOLAKA REGIONAL GOVERNMENT
PERANAN INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

FADEL MUHAMMAD BASRI

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Makassar

Jl. A. P. Pettarani Kampus Gunung Sari Baru Makassar

Email : fadelmuhbasri@gmail.com

SUMMARY

This study aims to determine the role of accounting information in financial policy making in the Kolaka Regency government. The population in this study were government employees who took part in making financial policies, namely Government Employees who served in the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Kolaka Regency which consisted of the Head of BPKAD, Secretariat, Budget Division, Treasury Division, Regional Asset Sector, and Accounting and Reporting. While the sample in this study was the entire population (Saturated Sample). Data collection techniques used were questionnaires and interviews. The data that has been obtained is then analyzed using descriptive analysis. The results of this study indicate that accounting information has an important role in the financial policy making of the Kolaka Regency government. Accounting information (results of financial statements) is not only a tool in decision making but also becomes one of the bases in the formulation of financial policies in the local government of Kolaka Regency.

Keywords : *Accounting information, and financial policy making.*

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai pemerintahan yang turut andil dalam pengambilan kebijakan keuangan yaitu Pegawai Pemerintahan yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kolaka yang terdiri dari Kepala BPKAD, Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset Daerah, dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi (Sampel Jenuh). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi akuntansi mempunyai peran penting dalam pengambilan kebijakan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Informasi akuntansi (Hasil dari laporan keuangan) tidak hanya sebagai alat dalam pengambilan keputusan tetapi juga menjadi salah satu dasar dalam perumusan kebijakan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Kolaka.

Kata Kunci : *Informasi akuntansi, dan pengambilan kebijakan keuangan.*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah dituntut untuk lebih teliti dalam mengambil kebijakan yang akan berdampak langsung dalam pengambilan keputusan. Salah satu kebijakan yang berperan penting dalam perkembangan suatu daerah dan perlu ketelitian dalam pengambilannya adalah pengambilan kebijakan keuangan. "Kebijakan keuangan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan strategi yang telah dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran" (Hanafi dan Mugroho, 2009).

Kebijakan keuangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat berguna dalam menentukan arah, sasaran dan prioritas pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu pengambilan kebijakan keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu daerah. Pengambilan kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah atau pemegang wewenang untuk memecahkan suatu masalah keuangan. Pengambilan kebijakan diterapkan baik dalam bentuk peraturan pemerintah, undang-undang, atau peraturan kementerian. Dalam pengambilan kebijakan terkait keuangan pemerintah akan merujuk pada peraturan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Salah satu contoh hasil dari pengambilan kebijakan keuangan pada sektor pemerintah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dimana dalam proses penyusunannya wajib melalui beberapa tahapan. APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses penyusunan APBD disusun melalui tahap-tahap sebagai berikut: (1) Pemerintah daerah menyusun Rancangan APBD, (2) Pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD

untuk dibahas, (3) DPRD membahas RAPBD bersama dengan Tim Anggaran Eksekutif, (4) RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD.

Suatu kebijakan tidak akan memiliki tingkat keakuratan yang baik jika tidak didukung berbagai informasi yang ada. Berbagai informasi yang diterima akan dianalisis oleh pihak manajemen untuk menghasilkan beberapa rekomendasi keputusan yang bersifat alternatif, yang salah satu diantaranya akan diambil sebagai keputusan yang terbaik. "para pengambil keputusan dalam melakukan pengambilan keputusan biasanya dihadapkan dengan berbagai permasalahan atau faktor-faktor penghambat, antara lain fakta yang tidak jelas, informasi yang kurang cukup, terkadang waktupun yang tidak banyak" (Arief, 2010).

Oleh sebab itu, dibutuhkan pengalaman dan kemampuan yang cukup dalam mengambil keputusan terkait suatu kebijakan.

Pengambilan kebijakan dalam pemerintah daerah biasanya dihadapkan dengan berbagai permasalahan, antara lain banyaknya informasi yang diperoleh dari berbagai sumber inform untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan dan juga dalam pemerintahan tentunya didasarkan atas informasi-informasi relevan yang diperoleh pemerintah. Begitu pula dengan kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah, yang seharusnya didasarkan atas informasi akuntansi atau laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah yang bersangkutan. Menurut Supriyono (2018) mengatakan bahwa:

Informasi akuntansi adalah aktivitas yang menghasilkan jasa, yaitu berfungsi menyajikan informasi kualitatif yang pada dasarnya bersifat keuangan dari suatu satuan usaha atau organisasi, informasi tersebut akan dapat dipakai oleh pihak eksternal maupun pihak internal untuk pengambilan keputusan dengan memilih beberapa alternatif.

Adapun sumber informasi dari informasi akuntansi yaitu laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.

Saat ini di Indonesia, informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Suatu keputusan tidak akan memiliki tingkat keakuratan yang baik jika tidak didukung berbagai informasi yang ada. Berbagai informasi yang diterima akan dianalisis oleh pihak manajemen untuk menghasilkan beberapa rekomendasi keputusan yang bersifat alternatif, yang salah satu diantaranya akan diambil sebagai keputusan yang terbaik.

Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdiri dari 7 (tujuh) komponen yaitu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menghasilkan informasi akuntansi mengenai sumber, alokasi, penggunaan sumber daya ekonomi, dan realisasi anggaran secara menyeluruh. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LpSAL) menghasilkan informasi mengenai pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah. Neraca menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan Operasional (LO) menghasilkan informasi mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah, operasi keuangan secara menyeluruh, memprediksi pendapatan-LO, dan penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional). Laporan Arus Kas (LAK) menghasilkan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menghasilkan informasi mengenai pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menghasilkan informasi mengenai informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta

menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kualitas informasi keuangan telah ditetapkan dalam SAP. SAP (paragraf 35 halaman 12) menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: (a) Relevan; (b) Andal; (c) Dapat dibandingkan; dan (d) Dapat dipahami.

Namun, telah banyak penelitian-penelitian di sektor privat yang menunjukkan bahwa informasi akuntansi memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan, utamanya keputusan yang berhubungan dengan keuangan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya di sektor privat yaitu Arief (2010) yang hasilnya menunjukkan bahwa informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan kredit. Selain itu, ada pula penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012) yang menunjukkan bahwa informasi akuntansi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan di bursa efek Indonesia (BEI).

Kabupaten Kolaka terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 59 Tahun 1959. Pada saat itu, Kabupaten Kolaka terdiri dari tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Kolaka, Tirawuta dan Batuputih. Sejak berdiri sebagai Kabupaten hingga saat ini, Kabupaten Kolaka telah dua kali dimekarkan menjadi wilayah daerah otonom baru yaitu Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Kolaka Timur. Secara administratif wilayah Kabupaten Kolaka terdiri atas 12 Kecamatan, 33 Kelurahan, dan 102 Desa. Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka merupakan contoh daerah yang memiliki keinginan kuat dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerahnya.

Proses perkembangan suatu daerah tentu saja tidak terlepas dari pengambilan kebijakan keuangan yang efektif, yang mana dalam prosesnya tersebut mencakup berbagai informasi-informasi yang di dapatkan salah satunya informasi mengenai keuangan (Informasi Akuntansi).

Kabupaten Kolaka merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tingkat pembangunan yang relatif tinggi, serta memiliki banyak sumber daya yang berkualitas, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, yang relatif cepat

tersebar luas keberadaannya di manca negara. Dan dalam proses pengelolaannya tersebut pengambilan kebijakan keuangan yang tepat sangatlah dibutuhkan. Kebijakan keuangan di setiap daerah termasuk daerah kabupaten kolaka dilakukan berkaitan dengan suatu kegiatan perencanaan dan pengendalian atas keuangan daerah. Kabupaten ini menjadi objek yang menarik untuk diteliti bagaimana pengambilan kebijakan keuangan dalam pemerintahannya.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengambilan Kesimpulan

Arifin Tahir (2014), “pengambilan kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.”

Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD.
- 2) DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- 3) Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 4) Kepada SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
- 5) RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas

dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

- 6) Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD berikutnya.
- 7) Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun berikutnya.
- 8) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Kebijakan Keuangan

Menurut Hanafi and Mugroho (2009) yaitu, Kebijakan keuangan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan strategi yang telah dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Informasi Akuntansi

Supriyono (2018) mengatakan bahwa : Informasi akuntansi adalah aktivitas yang menghasilkan jasa, yaitu berfungsi menyajikan informasi kualitatif yang pada dasarnya bersifat keuangan dari suatu satuan usaha atau organisasi, informasi tersebut akan dapat dipakai oleh pihak eksternal maupun pihak internal untuk pengambilan keputusan dengan memilih beberapa alternatif.

Laporan Keuangan

Menurut Hery (2014) “Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pokok terdiri dari komponen berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional
- 5) Laporan Arus Kas

- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

METODE PENELITIAN

Defenisi Operasional

1. Informasi akuntansi merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas. Dalam suatu organisasi/entitas, informasi akuntansi ini berbentuk laporan keuangan yang selalu dilaporkan setiap satu periode, biasanya 1 tahun. Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan output dari suatu proses akuntansi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum (PABU), yang nantinya digunakan sebagai alat informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Pengambilan kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah atau pemegang wewenang untuk memecahkan suatu masalah. Pengambilan kebijakan diterapkan baik dalam bentuk peraturan pemerintah, undang-undang atau peraturan kementerian. Dalam pengambilan kebijakan terkait keuangan pemerintah akan merujuk pada peraturan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai pemerintahan yang turut andil dalam pengambilan kebijakan keuangan yaitu Pegawai Pemerintahan yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kolaka yang terdiri dari Kepala BPKAD, Sekretaris, Bidang Anggaran, Bidang Pembendaharaan, Bidang Aset Daerah, dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Serta dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan pokok pada tahun 2018 yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Kolaka, adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling jenuh*, yaitu pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu memaparkan tentang

informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara variabel. Adapun alat analisis yang digunakan penulis untuk menganalisis kualitas kuesioner ialah menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Versi IBM SPSS Statistics Viewer*. dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas, serta melakukan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Realibilitas Variabel X (Informasi Akuntansi)

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya butir kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika butir pertanyaan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten.

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas untuk variabel X dengan menggunakan *SPSS 22* yang telah dilakukan untuk menguji informasi akuntansi pada pemerintah Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa r_{Hitung} setiap butir pernyataan lebih besar dari t_{Tabel} (0,68836) yang berarti data informasi akuntansi pemerintahan sudah terukur atau memiliki data yang valid berdasarkan hasil uji Validitas dan Reliabilitas yang dilakukan. Hal ini sudah sesuai dengan perolehan nilai rata-rata atau Cronbach Alpha variabel X (Informasi Akuntansi) sebesar 0,893 lebih besar dari 0,6 yang berarti informasi akuntansi sudah dapat dikatakan handal atau sudah konsisten. Jika dikaitkan dengan hasil kuesioner sebagaimana telah di jelaskan di atas maka dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah Kabupaten Kolaka sudah baik.

Uji Validitas dan Realibilitas Variabel Y (Pengambilan Kebijakan Keuangan)

Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk variabel Y dengan menggunakan *SPSS 22* yang telah dilakukan untuk menguji pengambilan kebijakan keuangan pada pemerintah Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa r_{Hitung} setiap butir pernyataan variabel Y lebih besar dari t_{Tabel} (0,68836) yang

menandakan data pengambilan kebijakan keuangan pemerintahan sudah terukur atau memiliki data yang valid berdasarkan hasil uji Validitas dan Reliabilitas yang dilakukan. Hal ini sudah sesuai dengan perolehan nilai rata-rata atau Cronbach Alpha variabel Y (Pengambilan kebijakan keuangan) sebesar 0,815 Lebih besar dari 0,6 yang berarti pengambilan kebijakan keuangan sudah memenuhi kategori handal atau sudah konsisten. Jika dikaitkan dengan hasil kuesioner sebagaimana telah di jelaskan di atas maka dapat dikatakan bahwa pengambilan kebijakan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka sudah baik.

Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bagaimana distribusi data kuesioner. Uji normalitas juga dilakukan sebagai langkah untuk menentukan jenis pengujian hipotesis yang akan dilakukan.

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan *SPSS 22* diperoleh nilai signifikansi variabel X, dan $Y < 0,05$ sehingga tidak memenuhi asumsi normal. Karena tidak memenuhi asumsi normal maka uji hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan uji nonparametrik. Pada penelitian ini uji nonparametrik yang di gunakan adalah uji korelasi *spearman-pearson*.

Uji Hipotesis

Penelitian ini akan menggunakan uji korelasi *spearman – pearson* yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel .

Berdasarkan hasil uji *korelasi spearman pearson* dengan menggunakan *SPSS 22* yang telah dilakukan antara peranan informasi akuntansi sebagai variabel X dalam pengambilan kebijakan keuangan sebagai variabel Y menunjukkan bahwa tHitung sebesar 0,636 angka tersebut menunjukkan korelasi yang cukup signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sedangkan untuk kriteria pengujian menunjukkan nilai sig. Sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,025 menunjukkan informasi akuntansi berperan positif dan signifikan terhadap pengambilan kebijakan keuangan pemerintah daerah (H_a).

PEMBAHASAN

1. Informasi Akuntansi

Informasi akuntansi adalah data kualitatif yang bersifat keuangan yang bersumber dari laporan

keuangan. Bagi penggunaanya informasi akuntansi sering digunakan sebagai rekomendasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat alternatif, yang salah satu diantaranya akan diambil sebagai keputusan yang terbaik. Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangannya. Adapun Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka bersumber dari laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari 7 komponen laporan keuangan yaitu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LpSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan informasi akuntansi yang di hasilkan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka menggunakan informasi tersebut sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan yang bersifat keuangan.

2. Pengambilan Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu hasil dari pengambilan kebijakan keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah Kabupaten Kolaka membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pelaksanaannya dengan menggunakan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman Penyusunan, dengan tahap-tahap penyusunan sebagai berikut : (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), (2) Pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas, (3) DPRD membahas RAPBD bersama Tim Anggaran Eksekutif, (4) RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi (APBD).

3. Peranan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai salah satu alternatif atau bahan pertimbangan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pokok yang tergolong dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan dapat dikatakan sebagai Salah satu sumber yang menghasilkan informasi akuntansi.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara variabel X (informasi akuntansi) dan variabel Y (pengambilan kebijakan keuangan) pada sektor pemerintahan, yang pada penelitian ini mengambil objek pemerintahan daerah Kabupaten Kolaka menegaskan peran penting informasi akuntansi. Meskipun penelitian ini menggunakan objek yang berbeda namun hasil dari penelitian mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai peran informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan keuangan pada sektor privat Riduwan (2016).

Penelitian ini mempertegas peran informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan kebijakan keuangan. Penelitian Riduwan (2016) lebih berfokus pada pengambilan keputusan produk/jasa sebuah perusahaan. Adanya hasil penelitian ini menjadikan informasi akuntansi tidak hanya penting bagi pengguna produk/jasa sebuah perusahaan/layanan publik namun dianggap penting juga bagi para pengambil kebijakan di pemerintah untuk menjalankan roda organisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka menggunakan Informasi Akuntansi sebagai alat dalam pengambilan kebijakan keuangannya.
2. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka

sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku saat ini yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sudah menggunakan Permendagri. Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dalam melaksanakan proses pengambilan kebijakan keuangannya.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yang berkaitan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, diharapkan lebih sering memperhatikan aturan-aturan yang berhubungan dengan proses pengambilan kebijakan keuangan atau pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya mengalami perubahan.
2. Selain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), pemerintah daerah juga diharapkan menggunakan laporan keuangan pokok yang lain sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan atau dapat menambah variabel-variabel lain terkait informasi akuntansi dan pengambilan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- ARIEF A, A., A. WIBOWO, and A. Santosa. 2010. Peran Laporan Keuangan dan Intuisi dalam Pengambilan Keputusan Kredit (Studi Empiris Pada Perbankan Kota Semarang), UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Arifin Tahir, M. S. 2014. Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Dewi, K. 2012. Pengaruh Luas Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia terhadap Keputusan Oleh Investor.
- Hanafi, D. I., and T. L. Mugroho. 2009. *Kebijakan keuangan daerah:*

*reformasi dan model pengelolaan
keuangan daerah di Indonesia:*
Universitas Brawijaya Press.

Hery. 2014. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta:
Kompas Gramedia.

Riduwan, A. 2016. Peranan informasi
akuntansi manajemen dalam
pengambilan keputusan dan
perumusan kebijakan, Akuntansi,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Supriyono, R. 2018. *Akuntansi keperilakuan:*
UGM PRESS.